

PARTISIPASI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

Participation In The Use Of The Budget On The Quality Of Financial Statement Sin The City Regional Secretariat Of Parepare

Rahmawati¹, Muhammad Nur²

Email: ramadani15rahma@gmail.com¹, muhammadnurfieb@gmail.com²

¹²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91131

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah apakah partisipasi penggunaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Parepare. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi penggunaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan Pada Sekretariat Daerah Kota Parepare. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, menjelaskan tentang pengaruh partisipasi penggunaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan dengan menggunakan Statistical Program for Social Science (SPSS) untuk menganalisis pengaruh partisipasi penggunaan anggaran (X) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Sekretariat Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi penggunaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada Sekretariat Daerah Kota Parepare yaitu 0.806 yang berarti pengaruh partisipasi penggunaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 80.6% dan sisanya 19.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan terlihat bahwa t hitung z tabel yaitu 16.785 z 0.664. sehingga hipotesis diterima, dimana dapat disimpulkan bahwa partisipasi penggunaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Parepare.

Kata Kunci: Partisipasi Penggunaan Anggaran, Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

The problem in this study is whether participation in budget use affects the quality of reports. The purpose of this study was to determine the effect of budgetary participation on the quality of financial reports at the Regional Secretariat of Parepare City. The method used in this study was descriptive quantitative, explaining the effect of budgetary participation on the quality of financial reports by using an Statistical Program for Social Science (SPSS) to identify the effect of budgetary participation (X) on the quality of financial reports (Y) at the Regional Secretariat of the City of Parepare. The results of this study state that the participation in the use of the budget has a positive and significant effect on the Regional Secretariat of the City of Parepare, namely 0.806, which means that the effect of participation in the use of the budget on the quality of financial reports is 80.6% and the remaining 19.4% is influenced by other factors not examined. Based on the results of the t test that has been carried out, it can be seen that the t count z table is 16,785 z 0.664. so that the hypothesis is accepted, which can be concluded that the participation in the use of the budget has a positive and significant effect on the quality of financial reports at the Regional Secretariat of the City of Parepare.

Keywords: Participation In The Use Of The Budget, Financial Statement Quality

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang menitik beratkan pada daerah kabupaten/Walikota memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab, Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa melalui sistem pemerintah daerah, Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Halim dan Kusufi (2013).

Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan sejak tahun 2004, akan tetapi tujuan utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, hal tersebut ditandai munculnya berbagai fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun 3 daerah. Penggunaan anggaran dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan, Mardiasmo (2006:3) dalam Untary (2015), pemerintah daerah merupakan daerah otonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah ini lebih mengerti dan memahami aspirasi-aspirasi yang ada dalam masyarakat.

Menurut Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Aziz (2015) menyebut bahwa hasil laporan keuangan pemerintah semester I tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester II tahun 2014. Indikatornya adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hasil audit badan pemeriksa keuangan menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat masih lebih baik dibandingkan Daerah yang kurang baik. Pemerintah daerah diminta terus mendorong upaya perbaikan pelaporan keuangan. Aziz menyayangkan sikap pemerintah daerah 5 yang terkesan tidak peduli dengan aturan ini. Salah satunya karena masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang terlambat diberikan atau tidak tepat waktu, www.merdeka.com dalam Situmorang (2016).

Badan pemeriksa keuangan menyarankan agar pemerintah daerah membuat rencana kegiatan untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena laporan keuangan di daerah yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada dewan perwakilan rakyat daerah setahun sekali atau diakhir masa jabatannya, (Permana, 2012). Namun dalam prakteknya, implementasi standar akuntansi pemerintah di lingkungan pemerintah tidaklah mudah, demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang, juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional dan rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah sudah pasti tidak dapat menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar, (Riana, 2011). Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah 6 melalui langkah-langkah nyata, terprogram dan mengikut sertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat

dipercaya dihasilkan dari sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi pemerintah daerah rata-rata masih lemah (Mardiasmo, 2006). Lemahnya transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab lemahnya sistem akuntansi pemerintah daerah. Saat ini akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan sering menjadi problem bagi daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat (Akbar, 2015).

Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam proses penggunaannya. Peraturan tentang sistem pengendalian *intern* bagi pemerintahan pusat/daerah tertuang dalam Peraturan 7 Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian Daniel & Yohanes (2013) menyebutkan dengan terciptanya penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga berimplikasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Saat ini otonomi daerah mendorong semua pemerintahan daerah di Indonesia untuk berbondong-bondong membangun daerahnya masing-masing, termasuk Sulawesi Selatan (Makassar) yang telah membangun kotanya, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki unit perwakilan dari BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan pembangunan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait, di Sulawesi Selatan memiliki beberapa kabupaten seperti, Kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Enrekang, Sidrap, Takalar, Jennepono, Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Selayar, Palopo, Luwu, dan Tanah Toraja. Pembangunan wilayah masing-masing telah dilakukan termasuk walikota Parepare.

Semua program pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Walikota Parepare semata-mata dilakukan untuk membangun daerah Walikota Parepare sebagai bentuk otonomi daerah yang diberlakukan di negara Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri maka disusunlah anggaran pendapatan dan belanja daerah di setiap tahunnya guna merealisasikan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah, Jl. Jendral Sudirman No. 78 Kota Parepare. Menurut Sugiyono (2010) "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja pada Sekretariat Daerah Kota Parepare yang berjumlah 70 karyawan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner. Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pernyataan yang dimuat dalam angket. Angket bersifat kooperatif dalam arti responden diharap bekerja sama dalam menyisipkan waktu dan menjawab pernyataan-pernyataan penelitian secara tertulis sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan. 3. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data berupa jumlah pegawai dan data-data lainnya yang relevan dengan penelitian, penulis bertatap muka secara langsung dengan orang-orang yang bekerja di Sekretariat Daerah Kota Parepare. Dalam penelitian ini penulis melakukan interview kepada pegawai, dimana pewawancara menanyakan apa yang dibutuhkan oleh penulis dan data apa yang akan dikumpulkan.

Jenis sumber data yang digunakan ialah 1. Jenis Data Primer Data primer merupakan yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara langsung dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer, Data sekunder dapat diperoleh melalui media

yang bersumber pada buku-buku perustakaan. Data sekunder dapat berupa kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka. Data ini menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya. Sifat data ini adalah data runtuh waktu, yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu.

HASIL PENELITIAN

Dasar kesimpulan yaitu dengan membandingkan nilai signifikan dengan level *if significant* (5%) adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikan $< 0,05$ maka *item* pernyataan valid.
2. Jika signifikan $> 0,05$ maka *item* pernyataan drop.

Maka penguji validitas pernyataan kuesioner pada masing-masing variabel dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Uji validitas instrumen pada taraf $\alpha = 0,05$

Indikator	Koefisien Korelasi	Signifikan	Keterangan
Partisipasi penggunaan anggaran			
X 1	0,807	0,000	Valid
X 2	0,713	0,000	Valid
X 3	0,811	0,000	Valid
X 4	0,640	0,000	Valid
X 5	0,795	0,000	Valid
X 6	0,356	0,000	Valid
Kualitas Laporan Keuangan			
Y1	0.671	0,000	Valid
Y2	0.736	0,000	Valid
Y3	0.762	0,000	Valid
Y4	0.717	0,000	Valid

Sumber : Output spss, 2022

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa instrumen validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel partisipasi penggunaan anggaran (X) dan kualitas laporan keuangan (Y) yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *corrected Item-Total correlation* $>$ dari *r* tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika dengan menggunakan uji statistik cronbach Alpha (α), koefisien reliabilitas $> 0,60$.

Tabel 2. Hasil uji Reliabilitas instrumen pada taraf $\alpha = 0,05$

Variabel	Nominal pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Partisipasi Penggunaan Anggaran	6	0,769	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	4	0,787	Reliabel

Sumber : Output spss 2022

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa reliabilitas struktur data jawaban pernyataan pada masing-masing variabel penelitian adalah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai cronbach's alpha yang berada pada 0,769 sampai dengan 0,787 yang berarti nilai tersebut $> 0,6$.

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas variabel penelitian, maka variabel penelitian adalah partisipasi penggunaan anggaran (X) dan kualitas laporan keuangan (Y) sudah dinyatakan valid handal.

Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pernyataan kuesioner adalah korelasi *product moment*. Dasar kesimpulan yaitu dengan membandingkan nilai signifikan dengan level *if significant* (5%) adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikan $< 0,05$ maka *item* pernyataan valid.
2. Jika signifikan $> 0,05$ maka *item* pernyataan drop.

Maka pengujian validitas pernyataan kuesioner pada masing-masing variabel dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Uji validitas instrumen pada taraf $\alpha = 0,05$

Indikator	Koefisien Korelasi	Signifikan	Keterangan
Partisipasi penggunaan anggaran			
X 1	0,807	0,000	Valid
X 2	0,713	0,000	Valid
X 3	0,811	0,000	Valid
X 4	0,640	0,000	Valid
X 5	0,795	0,000	Valid
X 6	0,356	0,000	Valid
Kualitas Laporan Keuangan			
Y1	0,671	0,000	Valid
Y2	0,736	0,000	Valid
Y3	0,762	0,000	Valid
Y4	0,717	0,000	Valid

Sumber : Output spss, 2022

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa instrumen validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel partisipasi penggunaan anggaran (X) dan kualitas laporan keuangan (Y) yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *corrected Item-Total correlation* $>$ dari *r* tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika dengan menggunakan uji statistik cronbach Alpha (α), koefisien reliabilitas $> 0,60$.

Tabel 4 Hasil uji Reliabilitas instrumen pada taraf $\alpha = 0,05$

Variabel	Nominal pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Partisipasi Penggunaan Anggaran	6	0,769	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	4	0,787	Reliabel

Sumber : Output spss 2022

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa reliabilitas struktur data jawaban pernyataan pada masing-masing variabel penelitian adalah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai cronbach's alpha yang berada pada 0,769 sampai dengan 0,787 yang berarti nilai tersebut $> 0,6$. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas variabel penelitian, maka variabel penelitian adalah partisipasi penggunaan anggaran (X) dan kualitas laporan keuangan (Y) sudah dinyatakan valid handal.

PEMBAHASAN

Partisipasi penggunaan anggaran diyakini mampu membangun suatu interaksi yang lebih baik antara pemimpin dengan bawahan. Dengan demikian akan tercipta kinerja yang kuat untuk merealisasikannya kearah yang lebih baik. Hal ini sependapat dengan penelitian

yang dilakukan oleh Niluh Sri Rahayu (2014) telah melakukan penelitian tentang partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan partisipasi penggunaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$, dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Partisipasi penyusunan anggaran mempunyai peran yang cukup besar dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan hal ini berarti bahwa partisipasi penggunaan anggaran dapat membantu sangat menunjang kinerja aparat pemerintah dari suatu entitas dan juga dapat menjadi sasaran akuntansi terbaik bagi tiap individu dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab maka akan menjadikan kinerja yang lebih baik bagi organisasi, sehingga semakin tingginya partisipasi penggunaan anggaran aparat pemerintah maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di suatu daerah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Irman Badu, dkk (2017) menjelaskan bahwa partisipasi penggunaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Ghaliyah Nimassita Triseptya dkk (2017) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua menyatakan partisipasi penggunaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi penggunaan anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Parepare, hal ini dikarenakan ada beberapa karyawan membentuk penggunaan anggaran dan ada juga beberapa tidak ingin ada penggunaan anggaran sehingga memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Partisipasi penggunaan anggaran berperan penting dalam suatu pekerjaan, partisipasi penggunaan anggaran akan berhasil hanya jika mereka dapat melenyapkan kompetisi dan berkonsentrasi pada perbedaan pandangan dan keahlian untuk mengatasi masalah atau tantangan dengan cepat.

Untuk itu, SKPD Sekretariat Daerah Kota Parepare selalu memberikan partisipasi penggunaan anggaran sebelum bekerja di SKPD tersebut. Dalam proses partisipasi penggunaan anggaran yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan atau pencapaian yang diinginkan oleh SKPD. Mengingat untuk mencapai tujuan utama SKPD diperlukan kerjasama yang kompak antar individu.

Dengan adanya partisipasi penggunaan anggaran yang dibentuk oleh SKPD pada Sekretariat Daerah Kota Parepare, jika semakin baik partisipasi penggunaan anggaran maka dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan akan dapat lebih ditinggikan. Hal ini membuat partisipasi penggunaan anggaran menjadi salah satu penunjang suatu SKPD untuk tetap bertahan.

Untuk mengetahui partisipasi penggunaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Parepare. Didapat hasil perhitungan regresi sederhana diatas antara partisipasi penggunaan anggaran (X) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dimana dalam penelitian ini ketika koefisien regresi dibawah 0,05 maka dapat dikatakan valid atau berpengaruh dan ketika koefisien regresi diatas 0.05 dikatakan tidak valid atau tidak berpengaruh. Dimana diperoleh koefisien regresi sebesar 0.467 yang artinya, jika partisipasi penggunaan anggaran mengalami kenaikan sebesar 1 kali, maka kualitas laporan keuangan (Y) juga mengalami peningkatan sebesar 0.643 kali. Dan dari uji koefisien determinasi didapatkan hasil sebesar 806 atau 80.6% artinya variabel bebas Partisipasi Penggunaan Anggaran (X) mampu memberikan pengaruh sebesar 80.6% terhadap variabel terikat (Y) dan sisanya sebesar 19.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti

Komarsari (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Eker (2007) dan Erwati (2009) yang menemukan bahwa partisipasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sedangkan hasil penelitian Sumarno (2005) mendukung hasil penelitian ini, dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi penggunaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Parepare dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil regresi lineal sederhana partisipasi penggunaan anggaran (X) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) berpengaruh positif dan signifikan dimana setiap kenaikan satu persen mengalami peningkatan kualitas laporan keuangan maka peluang untuk maksimal akan semakin tinggi pada Sekretariat Daerah Kota Parepare. Hasil uji regresi untuk variabel partisipasi penggunaan anggaran menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai t hitung lebih kecil dari t tabel sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian partisipasi penggunaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Parepare.

Saran

Bergantung pada hasil penelitian, pernyataan (kuesioner) dan kesimpulan yang dicapai, rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut :

Pegawai, berkaitan dengan kualitas laporan keuangan hendaknya para pegawai yang ada di BKD pada Sekretariat Daerah Kota Parepare agar merapikan dengan sangat baik budaya-budaya pada dalam kantor sehingga tidak merugikan lainnya, dan sesama pegawai harusnya saling memberikan motivasi setiap kali ada yang melakukan kesalahan dan teguran oleh pimpinan kantor.

Bagi karyawan pada BKD pada Sekretariat Daerah Kota Parepare, harus terus meningkatkan kualitas kerja dengan menerapkan nilai-nilai etika baiklah, lanjutkan dan asah keterampilan Anda dengan pelatihan dll, dan dengan membentuk sifat seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Pratama. 2016. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Budaya Organisasi terhadap Aparat Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Daerah)
- Agusti, R. (2012). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan dimoderasi oleh variabel desentralisasi dan budaya organisasi (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). Jurnal Ekonomi, 20(03).
- Fikri, dkk (2015) Pengaruh penerapan standar akuntansi intern sebagai variabel moderating
- Fikri, M. Ali, Biana Adha Inapty, Dan Rr. Sri Pancawati Martiningsi. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating". Mataram NTB. 2015.
- Menurut Anthony & Govindarajan (2005) selisihan anggaran adalah perbedaan antara jumlah anggaran dengan estimasi terbaik dari organisasi.

menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Mustika, M. (2022). SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 89-98.

Nurcholis, Hanif. "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Jakarta: Erlangga. Hal 42. 2011.

Ramadhani. & Nasution. (2009). "Pengaruh partisipasi anggaran terhadap prestasi manajer pusat pertanggungjawaban dengan motivasi sebagai variabel mediating". *Jurnal. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara*.

Sofi, Kohen. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Binta" Tanjungpinang. 2015.

Sukhemi. "Pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap transparansi keuangan daerah". 2011

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, azas keterbukaan (transparency)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan